



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No.3 (2025) pp: 3097-3101

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Analisis Belanja Modal terhadap Aset Tetap: Studi Kasus pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2024

Luther Untung<sup>1\*</sup>, Sita Yubelina Sabandar<sup>2</sup>, Johannes Baptista Halik<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

<sup>1</sup>[arilunt@gmail.com](mailto:arilunt@gmail.com)\*, <sup>2</sup>[tikupasangita@gmail.com](mailto:tikupasangita@gmail.com), <sup>3</sup>[johanneshalik@ukipaulus.ac.id](mailto:johanneshalik@ukipaulus.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis belanja modal dalam aset tetap pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nabire tahun anggaran 2024. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas belanja modal dalam pembentukan aset tetap serta sejauh mana pengelolaan aset tetap mendukung transparansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nabire tahun 2024. Analisis dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja modal dengan rencana anggaran, serta menilai peningkatan Aset tetap dibandingkan dengan tahun 2023 melalui interpretasi naratif dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal di Kabupaten Nabire telah digunakan untuk membentuk aset tetap yang signifikan, namun terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran. Diperlukan peningkatan pengelolaan aset tetap dan perencanaan belanja modal agar lebih efektif dan efisien.

*Kata kunci: Belanja Modal, Aset Tetap, Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah, Efisiensi*

### 1. Latar Belakang

Belanja modal merupakan instrumen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena digunakan untuk membiayai pembangunan aset tetap seperti gedung, infrastruktur jalan, jembatan, kendaraan operasional, maupun sarana kesehatan. Aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tidak hanya berfungsi sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga berdampak pada kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang [1]. Oleh karena itu, pengelolaan belanja modal yang efektif, efisien, dan akuntabel menjadi faktor krusial dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Kabupaten Nabire sebagai bagian dari Provinsi Papua Tengah menghadapi tantangan pembangunan yang khas, seperti keterbatasan infrastruktur dasar, kondisi geografis yang sulit diakses, serta kebutuhan pelayanan publik yang masih tinggi. Dalam konteks ini, belanja modal memegang peran strategis untuk meningkatkan kapasitas aset tetap sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah [2]. Namun, berbagai laporan menunjukkan bahwa realisasi belanja modal tidak selalu sejalan dengan rencana anggaran, sering terjadi keterlambatan pelaksanaan proyek, serta rendahnya optimalisasi pemanfaatan aset yang telah dibangun [3]. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana belanja modal mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan aset tetap daerah.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menegaskan pentingnya belanja modal bagi pertumbuhan aset tetap. Handayani menemukan adanya korelasi positif antara peningkatan belanja modal dan pertumbuhan aset tetap di Kota Bandung [4]. Simanjuntak menekankan bahwa efektivitas belanja modal sangat ditentukan oleh perencanaan dan pengawasan proyek [5], sedangkan Mulyani menyoroti adanya hambatan serius dalam realisasi anggaran di wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua [6]. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menelaah keterkaitan antara belanja modal dan aset tetap pada pemerintah daerah di Papua Tengah masih terbatas. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (research gap) yang perlu diisi untuk memahami pola pengelolaan belanja modal dalam konteks geografis dan sosial ekonomi yang berbeda.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nabire Tahun 2024 memberikan data yang relevan untuk menilai efektivitas belanja modal. Analisis terhadap LKPD tersebut dapat menjawab beberapa pertanyaan mendasar: (1) apakah realisasi belanja modal telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, (2) bagaimana kontribusi belanja modal terhadap pertumbuhan aset tetap, dan (3) sejauh mana efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas belanja modal dalam mendukung tata kelola keuangan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis berupa pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan belanja modal dan aset tetap, serta kontribusi praktis dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah [7].

## **2. Metode Penelitian**

### **2.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2024. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai realisasi belanja modal dan kaitannya dengan aset tetap, melalui analisis naratif dan interpretatif atas dokumen resmi pemerintah daerah [8].

### **2.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi penelitian adalah seluruh laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang memuat informasi mengenai belanja modal dan aset tetap. Adapun sampel penelitian difokuskan pada LKPD Kabupaten Nabire Tahun 2024. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan data secara sengaja berdasarkan relevansi dan ketersediaannya [9]. Teknik ini dianggap tepat karena penelitian bertujuan mengevaluasi praktik pengelolaan belanja modal pada satu entitas daerah tertentu yang memiliki karakteristik geografis dan fiskal khas.

### **2.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada urgensi peningkatan kualitas pengelolaan belanja modal di wilayah timur Indonesia yang masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur [6]. Penelitian dilaksanakan selama tahun 2024–2025, dengan periode pengumpulan data sekunder dari Januari hingga Mei 2025.

### **2.4 Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi belanja modal, serta mengevaluasi dampaknya terhadap aset tetap. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama: (1) efektivitas serapan anggaran, (2) efisiensi penggunaan belanja modal, dan (3) kontribusi terhadap pertumbuhan aset tetap. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis komparatif antarperiode (2023 dan 2024) untuk mengidentifikasi tren perubahan nilai aset tetap [10].

### **2.5 Perumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama:

1. Bagaimana realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan?
2. Bagaimana kontribusi masing-masing jenis belanja modal terhadap pembentukan dan peningkatan aset tetap di Kabupaten Nabire?
3. Bagaimana efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja modal dalam mendukung pengelolaan aset tetap berdasarkan LKPD Tahun 2024?

Rumusan masalah ini dirancang untuk memberikan jawaban yang komprehensif terkait pengaruh belanja modal terhadap aset tetap daerah [11].

## 2.6 Alur Pikir Penelitian

Alur pikir penelitian ini berangkat dari pemahaman teoretis bahwa belanja modal berkontribusi langsung pada peningkatan aset tetap pemerintah daerah [4], [5]. Berdasarkan teori akuntansi pemerintahan dan praktik pengelolaan keuangan daerah, perencanaan belanja modal yang baik diharapkan menghasilkan aset tetap yang efektif, efisien, serta mendukung akuntabilitas keuangan [12].

Kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Model alur pikir ini menunjukkan bahwa efektivitas belanja modal sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara perencanaan dan realisasi. Selanjutnya, pertumbuhan aset tetap yang dihasilkan akan berdampak pada transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik di daerah [13].

## 3. Hasil dan Diskusi

### 3.1 Realisasi Belanja Modal Kabupaten Nabire Tahun 2024

Berdasarkan LKPD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2024, pemerintah daerah menganggarkan belanja modal sebesar Rp315.620.498.541,00 dengan realisasi sebesar Rp297.283.313.049,00 atau 94,19% dari total anggaran [14]. Data tersebut menunjukkan bahwa secara umum serapan anggaran tergolong tinggi, meskipun masih terdapat deviasi yang cukup signifikan pada beberapa kategori.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Nabire Tahun 2024

Jenis Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Perubahan 2024 vs 2023 (%)
Tanah	6.965.840.304	4.869.423.978	8.146.029.696	69,90	-40,22
Peralatan dan Mesin	57.996.800.167	49.084.401.301	46.789.641.920	84,63	+4,90
Gedung dan Bangunan	54.373.719.518	50.585.049.827	69.888.555.110	93,03	-27,62
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	193.816.538.522	189.785.681.378	183.717.469.920	97,92	+3,30
Aset Tetap Lainnya	2.445.800.030	2.936.956.565	207.681.000	120,08	+1.314,01
Aset Lainnya	21.800.000	21.800.000	0	100,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>315.620.498.541</b>	<b>297.283.313.049</b>	<b>308.749.377.646</b>	<b>94,19</b>	<b>-3,71</b>

Sumber: LKPD Kabupaten Nabire Tahun 2024 (diolah).

Hasil ini menjawab rumusan masalah pertama, yaitu realisasi belanja modal di Nabire relatif tinggi, meskipun secara nominal menurun 3,71% dibandingkan tahun 2023.

### 3.2 Kontribusi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Aset Tetap

Analisis terhadap neraca menunjukkan bahwa total aset tetap Kabupaten Nabire meningkat dari Rp2.063.628.234.534,16 pada tahun 2023 menjadi Rp2.229.038.529.817,73 pada tahun 2024, atau mengalami kenaikan sebesar Rp165.410.295.283,57 (8,02%) [15].

Tabel 2. Perbandingan Aset Tetap Kabupaten Nabire Tahun 2023–2024

Jenis Aset Tetap	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Selisih (Rp)	Pertumbuhan (%)
Tanah	151.736.918.479	152.764.918.479	1.028.000.000	0,68
Peralatan dan Mesin	580.377.564.689	630.134.035.941	49.756.471.252	8,57
Gedung dan Bangunan	1.271.828.455.165	50.585.049.827	-1.221.243.405.338	-95,97
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.976.071.868.222	2.165.145.816.318	189.073.948.096	9,57
Aset Tetap Lainnya	20.702.568.722	21.675.332.707	972.763.985	4,70
Konstruksi Dalam Pengerjaan	23.445.309.371	14.841.568.678	-8.603.740.693	-36,69
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>2.063.628.234.534</b>	<b>2.229.038.529.817</b>	<b>165.410.295.283</b>	<b>8,02</b>

Sumber: LKPD Kabupaten Nabire Tahun 2024 (diolah).

Dari tabel di atas terlihat bahwa kategori **jalan, irigasi, dan jaringan** menjadi penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan aset tetap dengan kenaikan 9,57%, sementara kategori **gedung dan bangunan** justru mengalami penurunan tajam (95,97%) yang kemungkinan terkait dengan reklasifikasi aset atau penghapusan aset tidak produktif. Hal ini menjawab rumusan masalah kedua mengenai kontribusi masing-masing kategori belanja modal terhadap aset tetap.

### 3.3 Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Belanja Modal

Dengan tingkat realisasi sebesar 94,19%, efektivitas penyerapan anggaran dapat dikategorikan tinggi. Namun, adanya penyimpangan signifikan pada belanja modal tanah (69,90%) dan penurunan nominal belanja modal dibandingkan tahun 2023 (-3,71%) menunjukkan potensi masalah dalam perencanaan anggaran [16].

Dari sisi efisiensi, proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah mencapai 16,96%, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 (19,95%). Penurunan ini berpotensi mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jangka panjang [17].

Akuntabilitas keuangan daerah juga dipengaruhi oleh pencatatan aset tetap yang tepat sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Perbedaan mencolok pada pos gedung dan bangunan mengindikasikan perlunya audit lebih lanjut terhadap klasifikasi aset agar laporan keuangan dapat diandalkan [18].

### 3.4 Diskusi

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun realisasi belanja modal di Kabupaten Nabire relatif baik, namun terdapat inkonsistensi dalam kontribusi terhadap aset tetap. Peningkatan signifikan pada infrastruktur jalan dan jaringan sejalan dengan temuan Kawatu bahwa belanja modal berpengaruh langsung terhadap kenaikan aset tetap [19]. Sebaliknya, penurunan drastis pada kategori gedung dan bangunan memperlihatkan kelemahan dalam pengelolaan dan rekonsiliasi data aset, yang juga pernah diungkapkan oleh penelitian Mulyani mengenai kendala di wilayah Indonesia Timur [6].

Dengan demikian, hasil ini menjawab rumusan masalah ketiga: efektivitas serapan tinggi, efisiensi relatif menurun, dan akuntabilitas masih memerlukan penguatan. Secara teoretis, temuan ini memperkuat literatur mengenai peran belanja modal terhadap pertumbuhan aset tetap. Secara praktis, hasil ini menekankan pentingnya penguatan perencanaan anggaran, pengawasan, serta sistem inventarisasi aset daerah agar belanja modal dapat memberikan manfaat optimal bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah [20] – [24].

## 4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Nabire pada Tahun Anggaran 2024 mencapai 94,19% dari total anggaran yang ditetapkan. Angka tersebut mencerminkan tingkat efektivitas serapan yang cukup tinggi, meskipun secara nominal mengalami penurunan sebesar 3,71% dibandingkan tahun

2023. Dari sisi kontribusi terhadap aset tetap, belanja modal terbukti meningkatkan nilai aset tetap daerah sebesar 8,02%, dengan porsi terbesar berasal dari pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan, sementara pos gedung dan bangunan justru mengalami penurunan signifikan akibat faktor reklasifikasi atau penghapusan aset. Temuan ini mengindikasikan bahwa belanja modal dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan aset tetap, namun kualitas perencanaan dan akurasi pencatatan aset masih menjadi tantangan utama. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya pemerintah daerah untuk meningkatkan proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah, mengoptimalkan perencanaan lahan dan pembangunan gedung, serta memperkuat sistem inventarisasi aset agar tercapai akuntabilitas yang lebih baik. Dalam konteks aplikasi praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan fiskal daerah, khususnya dalam penyusunan APBD dan laporan keuangan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah atau melakukan analisis komparatif antar-daerah, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola pengelolaan belanja modal dan aset tetap di berbagai konteks pembangunan daerah.

## Referensi

- [1] H. Halim and M. Kusufi, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- [2] Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,” Jakarta, 2010.
- [3] S. Syaiful, *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- [4] R. Handayani, “Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Aset Tetap di Kota Bandung,” *Jurnal Akuntansi Publik*, vol. 5, no. 2, pp. 112–121, 2021.
- [5] R. Simanjuntak, “Efektivitas Belanja Modal dan Pengawasan Proyek Pemerintah Daerah,” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, vol. 12, no. 1, pp. 55–67, 2020.
- [6] S. Mulyani, “Kendala Realisasi Anggaran di Wilayah Indonesia Timur,” *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, vol. 8, no. 2, pp. 87–99, 2019.
- [7] L. Nurhaeni, “Pengaruh Belanja Modal terhadap Ekuitas Dana: Studi pada SKPD Kota Palu,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 19, no. 3, pp. 201–210, 2016.
- [8] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- [9] D. Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- [10] A. Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- [11] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), “Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” Jakarta, 2024.
- [12] A. Abdullah and H. Halim, *Hubungan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- [13] K. Kawatu, “Pengaruh Belanja Modal terhadap Aset Tetap Pemerintah Daerah,” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, vol. 7, no. 1, pp. 14–22, 2019.
- [14] Pemerintah Kabupaten Nabire, *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024*. Nabire: BPKAD, 2025.
- [15] Pemerintah Kabupaten Nabire, *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023*. Nabire: BPKAD, 2024.
- [16] N. Afiah, *Akuntansi Aset Tetap*. Bandung: Universitas Padjadjaran Press, 2009.
- [17] N. Lam and P. Law, *Public Sector Accounting and Finance*. Hong Kong: McGraw-Hill, 2014.
- [18] D. Weygandt, J. Kieso, and T. Kimmel, *Accounting Principles*. New York: John Wiley & Sons, 2011.
- [19] Mulyadi, *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- [20] Mulyadi, *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- [21] F. Medea, S. Y. Sabandar, and R. Badawi, “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara,” *J. Mark. Manag. Innov. Bus. Rev.*, vol. 2, no. 1, pp. 45–51, 2024, doi: 10.63416/mrb.v2i1.226.
- [22] N. Paranoan, S. Y. Sabandar, A. Paranoan, E. Pali, and I. Pasulu, “The Effect of Fraud Prevention, Fraud Detection, Investigative Audits, and Professionalism of Auditors on Efforts to Minimize Fraud in the Financial Statements of Companies in Makassar City, Indonesia,” *WSEAS Trans. Inf. Sci. Appl.*, vol. 19, pp. 54–62, 2022, doi: 10.37394/23209.2022.19.6.
- [23] R. Paembonan, P. Ma’na, and J. Halik, “Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua,” *J. Mark. Manag. Innov. Bus. Rev.*, vol. 2, no. 2, pp. 1–6, 2024, doi: 10.63416/mrb.v2i2.254.
- [24] L. Setiawati, M. A. Todingbua, and J. B. Halik, “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Makassar Utara,” *Sci. J. Econ. Manag. Business, Account.*, vol. 15, no. 1, pp. 141–155, 2025, doi: 10.37478/als.v15i01.5342.